

BAB VI PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang sinergitas antar stekholder dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan yang dianalisis dengan menggunakan teori Sinergitas dapat dilihat dari dua variabel yaitu komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh antar *stakeholder* menurut Triana Rahmawati, sebelumnya dilakukan identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Ampiang Parak. Terdapat lima *stakeholder* yang terlibat diantaranya pihak Akademisi yang terdiri dari beberapa peneliti dari universitas yang ada di Indonesia, dan pihak yang melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) oleh LPPM UNAND, dan kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan KKN. Pihak akademisi berperan sebagai konseptor yaitu memberikan teori, sharing pengetahuan mengenai hasil penelitian serta FGD yang dilakukan agar menjadi acuan dan referensi dari setiap *stakeholder* dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata.

Swasta yang hanya terdiri dari PT.PLN UIW Sumbar yang menjadi satu-satunya pihak swasta yang tergabung dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Ampiang Parak yang berperan sebagai *enabler* yaitu memberikan nilai tambah terhadap sarana yang telah ada. Dalam hal ini adanya pemberian dana TJSL oleh PT.PL UIW Sumbar sebagai bentuk dukungan pengembangan sarana dan prasarana ekowisata di kawasan tersebut. Masyarakat yang terdiri dari komunitas LPPL Ampiang Parak yang berperan sebagai pengelola secara langsung kawasan konservasi penyu Ampiang Parak.

Pemerintah dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis Ekowisata Ampiang Parak yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Nagari Ampiang Parak, BPSPL Padang. Pemerintah disini berperan sebagai regulator, mediator, dan fasilitator dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu Ampiang Parak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas terkait.

Media dalam pengembangan kawasan tidak terlalu terlibat banyak hanya dikarenakan adanya tulisan yang dikirimkan dari kantor redaksi LPPL Ampiang Parak kepada beberapa penerbit seperti Singgalang, Haluan Padang, Padang Ekspres. Selain itu media juga dilibatkan dengan adanya website yang dimiliki oleh komunitas LLPL Ampiang Parak, namun dikarenakan terkendalanya biaya dalam mengelola website tersebut akhirnya bermuara dengan tidak aktifnya website tersebut. Padahal media menjadi peran penting dalam pengembangan kawasan ini yaitu sebagai media publikasi dan membangun brand image serta citra dari kawasan tersebut dalam menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Ampiang Parak. Berdasarkan dari identifikasi *stakeholder* pada pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak menggunakan model *pentahelix* yaitu adanya keterlibatan dan kerjasama dari 5 *stakeholder* yaitu akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah dan media.

Sinergitas antar *stakeholder* dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder*. Sinergitas antar *stakeholder* yang dilihat dari bentuk komunikasi yang terjalin ternyata setiap *stakeholder* memiliki bentuk komunikasi yang berbeda. Komunikasi ke bawah hanya dilakukan oleh pihak pemerintah kepada komunitas dalam memberikan regulasi, arahan, dan pembinaan serta pendampingan. Untuk komunikasi ke atas hanya dilakukan oleh pihak

komunitas dengan pemerintah, komunitas dengan swasta. Yaitu dikarenakan adanya umpan balik yang diberikan oleh komunitas terhadap arahan, regulasi, bantuan yang telah diberikan oleh beberapa *stakeholder* terkait. Umpan balik ini baik berupa informasi dan kendala dilapangan atau juga dengan adanya laporan kegiatan pada evaluasi dan monitorin bantuan yang telah diberikan.

Komunikasi lateral hanya dilakukan pada satu unsur *stakeholder* yang sama seperti pada unsur pemerintah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Nagari, BPSPL Padang. Yang merupakan *stakeholder* yang selevel dan satu unsur namun tidak memiliki hirarki dan kewenangan yang langsung atau sama. Komunikasi diagonal hanya dilakukan oleh pemerintah dengan unsur swasta dengan unsur akademisi yang memiliki kewenangan yang berbeda dan tidak tergabung dalam satu unsur yang sama.

Pada kegiatan koordinasi semua stakeholder sudah terlibat dalam 7 syarat dari 9 syarat yang ada dalam mencapai koordinasi yang efektif. Dua syarat koordinasi yang tidak melibatkan seluruh *stakeholder* saling berkoordinasi yaitu kesempatan awal dikarenakan dalam melakukan pengembangan kawasan ini masing-masing *stakeholder* memiliki waktu bergabung yang berbeda dan adanya rentang waktu yang dimiliki *stakeholder* seperti pihak akademisi hanya ketika melakukan penelitian saja, swasta rentang waktu kerjasama selama kegiatan TJSL berlangsung. Namun walaupun masing-masing stakeholder memiliki batas waktu dalam melakukan pengembangan di kawasan ini ternyata tidak mempengaruhi sinergitas stakeholder dalam melakukan programnya, karena masing-masing stakeholder sudah memiliki porsi masing-masing dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi dari lembaga yang mereka pegang.

Selain itu pada indikator organisasi yang sederhana dalam mencapai koordinasi yang efektif tidak peneliti temukan dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di

Ampiang Parak dari 5 *stakeholder* yang ada tidak terikat dalam satu SK yang sama. Sehingga kegiatan koordinasi pada syarat organisasi yang sederhana hanya dilakukan antara komunitas dengan masing-masing stakeholder yang memiliki ikatan yang jelas berupa SK seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Namun dalam hal ini tidak menjadi hambatan bagi seluruh stakeholder untuk saling berkoordinasi, dikarenakan setiap stakeholder sudah sadar akan fungsi masing-masing serta sudah menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dari setiap stakeholder.

1.2 Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak seharusnya dilakukan komunikasi kelembagaan antar stakeholder untuk mencegah kemungkinan terjadinya ego sektoral dari masing-masing stakeholder.
2. Dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Ampiang Parak seharusnya ada ikatan yang jelas melalui SK, MOU, atau bentuk perjanjian kerjasama lainnya agar lebih jelas lagi wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing *stakeholder*.
3. Dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata dalam berkoordinasi agar lebih baik membuat forum komunikasi.

4. Komunikasi seharusnya dilakukan secara rutin dan terjadwal antar *stakeholder* terkait agar terjadinya akuntabel dan transparansi dalam informasi dari masing-masing *stakeholder*.
5. Adanya penelitian lanjutan mengenai community governance karena ditemukan fenomena adanya komunitas lokal yang dibentuk dari inisiasi masyarakat dan secara swadaya dilakukan oleh masyarakat, adanya pemberdayaan masyarakat melalui komunitas LPPL Ampiang Parak.

